PERNYATAAN PERS TAHUNAN
MENTERI LUAR NEGERI
TAHUN 2020

Bismillahirrahmanirrohim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua
Yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri, para Mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri,
Yang terhormat Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi I DPR,
Dewan Juri Adam Malik Award,
Duta Besar Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional,
Para Senior Kami,
Para Duta Besar, Sesepuh serta seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, baik di Tanah Air maupun di luar negeri,
Pimpinan media massa, rekan-rekan wartawan, stakeholders
Hadirin yang terhormat.

Allow me to begin by wishing all of you a very happy and prosperous New Year.

May 2020 be a better, more prosperous and peaceful year for all.

Atas nama seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri, saya ingin mengucapkan "Selamat Tahun Baru 2020".

Kita harus bekerja lebih keras agar tahun 2020 menjadi tahun yang lebih baik bagi semua.

Saya juga ingin menyampaikan selamat datang kepada para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Indonesia yang hadir pada PPTM kali ini.

Mulai besok sampai 11 Januari 2020, Kementerian Luar Negeri akan melakukan Rapat Kerja dengan para Kepala Perwakilan Indonesia di luar Negeri.

Fokus utama dari Rapat Kerja tahun ini adalah penguatan Diplomasi Ekonomi.

Hadirin yang saya hormati,

Kita sudah saksikan, pemutaran video mengenai langkah politik luar negeri Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Diplomasi Indonesia berdiri tegak, bermartabat, memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia.

Indonesia selalu konsisten, menjadikan pelaksanaan politik luar negeri sebagai bagian dari penyelesaian masalah dunia.

Indonesia secara konsisten melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif di tengah dunia yang penuh tantangan, dimana konflik dan perang masih terjadi di beberapa tempat; penurunan trend pertumbuhan ekonomi dunia terjadi; berbagai

masalah kemanusiaan masih memprihatinkan; dan masa depan bangsa Palestina, misalnya, justru menghadapi tantangan lebih besar

Selain apa yang sudah disampaikan di video, ijinkan saya menyampaikan beberapa tambahan dan penekanan untuk pelaksanaan tahun 2019.

Hadirin yang saya hormati,

Indonesia membuka tahun 2019 dengan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB. Keanggotaan ini masih akan berlangsung sampai akhir 2020.

"Investing in peace" adalah ruh besar yang mendasari kerja Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Investing in women also means investing in peace. I am sure that all of you agree.

Oleh karena itu, selama satu tahun kemarin, Indonesia banyak melakukan investasi pada isu perempuan, perdamaian dan keamanan. *Women, peace and security issue*s.

Selama Keketuaan Indonesia di DK PBB pada bulan Mei yang lalu, pemberdayaan *female peacekeepers* menjadi salah satu topik utama pembahasan di DK PBB.

Perempuan merupakan aset. Perempuan dapat berkontribusi untuk perdamaian.

Oleh karena itu dalam tahun 2019 ini, Indonesia menyelenggarakan *Regional Training for Women, Peace and Security; ASEAN Women Interfaith Dialogue; dan* pembahasan isu *women, inclusivity and the state of democracy pada Bali Democracy Forum,* dimana hadir sejumlah Menteri Luar Negeri Perempuan.

Di sela-sela Sidang Umum PBB, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam peluncuran *Global Alliance of Regional Women Mediator Networks.*

Desember 2019, Indonesia juga menyelenggarakan dialog antara perempuan Indonesia dengan perempuan Afghanistan.

Indonesia mengharapkan perempuan Afghanistan akan dapat terus berkontribusi, baik dalam proses perdamaian maupun mengisi masa depan Afghanistan.

Hadirin yang saya hormati,

2019 juga ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, pelambatan pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan global ke tingkat terendah sejak krisis keuangan global tahun 2009.

Di tengah situasi itu, Indonesia konsisten menjalin kerja sama ekonomi seluas mungkin berdasarkan asas saling menguntungkan, saya ulangi, berdasarkan asas saling menguntungkan.

Kerja sama perdagangan dan investasi seharusnya dapat saling menguntungkan, berkeadilan, dan bukan *zero-sum game*.

Dengan cara pikir seperti ini Indonesia terus menggiatkan diplomasi ekonomi.

Pada tahun 2019 perundingan CEPA dengan Australia dan EFTA telah diselesaikan. Perundingan PTA dengan Mozambique, PTA pertama Indonesia di benua Afrika, juga telah diselesaikan. Perundingan FTA dengan Chile, perjanjian pertama di kawasan Amerika Latin dan Karibia, juga telah selesai. Perundingan RCEP telah diselesaikan setelah melalui 28 putaran sejak tahun 2013. Indonesia telah menandatangani MoC dengan EAEU. Indonesia telah memulai perundingan dengan Fiji, perundingan pertama untuk kawasan Pasifik Selatan. Perundingan dengan Uni Eropa masih terus dilakukan

Prioritas kerja sama ekonomi dengan benua Afrika diwujudkan, antara lain melalui penyelenggarakan *"Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue"* sebagai kelanjutan Indonesia-Africa Forum tahun 2018.

Sejak Forum ini dilaksanakan, berbagai perusahaan Indonesia telah menjalin kerja sama bisnis dan kontrak pekerjaan kurang lebih USD 2 milyar di 9 negara yaitu: Senegal, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Tanzania, Mozambik, Ethiopia, Madagaskar, Mesir… serta sejumlah entitas seperti Africa Export-Import Bank, Standard Chartered Bank, Commerzbank dan Development Bank of the Central African States.

Pada tataran PBB, atas prakarsa Indonesia, pada 19 Desember 2019, Majelis Umum PBB telah mensahkan secara konsensus resolusi mengenai ekonomi kreatif dan menetapkan tahun 2021 sebagai Tahun Ekonomi Kreatif International, *International Year of Creative Economy for Sustainable Development*.

Hadirin yang saya hormati,

Di penghujung 2019, Politik Luar Negeri Indonesia, antara lain ditutup dengan hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Myanmar melalui Sekretariat ASEAN, untuk membantu repatriasi pengungsi dari Cox's Bazar ke Rakhine State.

Indonesia terus berupaya untuk menjadi bagian penyelesaian masalah Rakhine State. Indonesia ingin memastikan bahwa ASEAN dapat berkontribusi dan memastikan bahwa *progress* terjadi di lapangan.

Sudah terlalu lama para *displaced persons* menderita. Indonesia tidak ingin kondisi mereka semakin memburuk.

Indonesia mengapresiasi kunjungan ke-2 tim ASEAN bersama pemerintah Myanmar dan difasilitasi oleh otoritas Bangladesh ke Cox's Bazar menjelang akhir Desember 2019.

Komunikasi dengan para *displaced persons* perlu terus dilakukan. Suara mereka perlu didengarkan. *Trust building* perlu terus dibangun agar repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dilakukan dan situasi kondusif di Rakhine State dapat lestari.

Masih terkait diplomasi kemanusiaan, pada awal Desember 2019, Indonesia telah menyerahkan satu buah rumah sakit bantuan masyarakat Indonesia di Mrauk U, Rakhine State kepada Pemerintah Myanmar.

Rumah sakit dibangun dengan melibatkan penduduk dari berbagai macam latar belakang agama dan etnis dan diharapkan dapat mendekatkan jarak diantara masyarakat Rakhine State.

Rumah sakit tersebut juga diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat setempat akan pelayanan kesehatan yang inklusif.

Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak dengan pemerintah Myanmar, Bangladesh, Sekjen PBB, Utusan Khusus Sekjen PBB, UNHCR, IOM, ICRC dan pihak terkait lain untuk membantu agar progress terjadi di lapangan.

Indonesia siap berkontribusi bagi penyediaan kebutuhan dasar masyarakat di Rakhine State serta berkontribusi bagi upaya membangun saling percaya diantara masyarakat.

Selama 2019, *enggagement* dengan Kawasan Pasifik terus diperkuat.

Kita bangun era baru kemitraan dengan negara Pasifik, “Pacific Elevation”.

Untuk pertama kalinya, Indonesia mengadakan Indonesia-South Pacific Forum di Jakarta dan Pacific Exposition di Auckland.

Hadirin yang saya hormati,

Kekuatan besar dunia terus berupaya meningkatkan pengaruh di kawasan. *Distrust* menyebabkan penghalang terciptanya lingkungan yang kondusif.

Dalam suasana seperti ini, Indonesia mengajukan konsep Indo-Pasifik.

Indonesia mengharapkan stabilitas, *habit of dialogue*, kerja sama, penghormatan terhadap aturan internasional tetap dijunjung tinggi di kawasan Indo-Pasifik.

Rivalitas kekuatan sudah seharusnya dikonversi menjadi kerja sama.

Indonesia akan terus mendorong ASEAN untuk memainkan peran sentral dalam memajukan stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik.

ASEAN harus terus melakukan *disruptive innovation,* untuk keluar dari zona nyaman, agar tetap relevan menjawab tantangan saat ini.

Dengan komitmen tersebut, Para pemimpin ASEAN telah meng-adopsi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, sebagai pegangan bagi ASEAN untuk melakukan *engagement* di Indo-Pacific.

Outlook ini sifatnya inklusif dan terbuka bagi kerja sama dengan semua pihak.

Hadirin yang terhormat,

2019 juga ditutup dengan pembebasan 2 WNI yang disandera di Filipina Selatan. Dalam lima tahun ini, Pemerintah telah membebaskan 45 orang WNI yang disandera.

Saat ini, masih 1 orang lagi WNI yang disandera.

Kedepan, penting bagi Indonesia-Malaysia-Filipina untuk menguatkan langkah prevensi agar korban tidak terus jatuh.

Kerja sama trilateral, penjagaan keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya, penting untuk ditingkatkan.

Kerja pelindungan terus dikuatkan sepanjang 2019: menangani 27.033 kasus WNI di luar negeri; menyelamatkan 197,71 milyar rupiah hak finansial WNI/PMI; dan merepatriasi 17,607 WNI bermasalah.

Kasus-kasus *high profile* yang menjadi perhatian publik juga telah ditangani. Siti Aisyah telah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. 40 WNI korban kasus pengantin pesanan atau *mail-order bride* telah dipulangkan.

Indonesia juga aktif dalam pembentukan norm setting baik di tingkat regional maupun global yaitu pengesahan Resolusi PBB mengenai *"Violence Against Women Migrant Workers", Nopember 2019* dan *Bali Process Policy Guide on Return and Reintegration*.

Mekanisme bilateral untuk perlindungan PWNI dan kerja sama kekonsuleran juga diperkuat. Pada 2019, konsultasi Konsuler dilakukan dengan Australia, India, Iran, Uni Eropa, Jepang, dan Korea.

Berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Kementerian Luar Negeri di bidang pelayanan publik pada tahun 2019, membuahkan berbagai penghargaan dan apresiasi publik.

Hadirin yang saya hormati,

Proses negosiasi perbatasan juga terus diintensifkan.

Indonesia dan Filipina telah menuntaskan perundingan dan mendepositkan Perjanjian batas ZEE ke PBB pada September 2019.

Kedua negara akan memulai dan intensifkan perundingan batas landas kontinen.

Pada 2019, Tim Teknis Indonesia dan Malaysia telah menyepakati secara prinsip batas laut territorial di Laut Sulawesi. Ini merupakan kemajuan besar. Sejak 1970 belum pernah ada batas maritim yang berhasil disepakati.

Untuk batas darat, telah diselesaikan 4 dari 9 *outstanding boundery problems* dengan Malaysia, yang *pending* sejak 1989.

Pada 2019 ini, Indonesia dan Singapura berhasil menyepakati secara prinsip rencana *realignment FIR* (*flight information region*) yang berbasis pada batas wilayah Indonesia Pasca UNCLOS 1982.

Kesepakatan ini dilanjutkan dengan perundingan teknis kedua negara dan diharapkan dapat selesai dalam waktu tidak terlalu lama.

Hadirin yang saya hormati,

Tahun, 2020 dibuka dengan situasi yang memprihatinkan di Iran, Iran, sekitarnya. Indonesia mengharapkan semua pihak terkait menahan diri agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut. *Contigency Plans, Hotlines* Perwakilan RI dan *Crisis Center* di Kemlu telah disiapkan untuk antisipasi dampak krisis tersebut terhadap WNI.

Ijinkan saya sekarang untuk menyampaikan prioritas politik luar negeri untuk tahun 2020 dan arah 5 tahun ke depan.

Diplomasi Indonesia akan dijalankan berdasarkan prioritas 4+1 yaitu: penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; dan peran Indonesia di kawasan dan global. Sementara plus satu-nya adalah penguatan infrastruktur diplomasi.

Dalam 5 tahun ke depan, diplomasi ekonomi akan betul-betul diperkuat. Wakil Menteri Luar Negeri telah mendapatkan tugas khusus Presiden RI untuk memperkuat diplomasi ekonomi.

Penugasan-penugasan konkrit akan diberikan kepada para Kepala Perwakilan dalam memperkuat diplomasi ekonomi.

Hadirin yang terhormat,

Setiap negara menginginkan sebuah pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas.

Mimpi besar dunia bagi sebuah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, memerlukan sebuah *enabling environment* yang kuat.

Salah satu *enabling environment* yang diperlukan adalah perdamaian dan stabilitas dunia.

Meningkatnya rivalitas, persaingan bahkan proxi berpotensi sebabkan instabilitas dan konflik.

Proteksionisme, nasionalisme sempit dan populisme masih akan berlanjut.

Tren negatif ini harus ditransformasikan menjadi energi positif.

Pesimisme yang ada di dunia harus diubah menjadi optimisme.

Rivalitas penting untuk diubah menjadi kerja sama.

Trust deficit harus diganti menjadi *strategic trust*.

Pendeknya, Indonesia ingin berada di depan, menjadi bagian dari upaya memajukan kolaborasi yang saling menguntungkan di dunia.

Di tengah rivalitas, Indonesia konsisten membangun aliansi untuk memperkuat paradigma kerja sama dan kolaborasi.

Di tengah semakin meningkatnya sikap proteksionisme, Indonesia akan membangun koalisi untuk terus mendorong paradigma saling menguntungkan, berkeadilan dan bukan zero-sum.

Kata kunci adalah kolaborasi.

Kolaborasi akan menciptakan peluang, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan dapat menemukan solusi bagi tantangan global.

Ini yang sebenarnya Indonesia dan ASEAN ingin proyeksikan melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Kawasan Indo-Pasifik adalah *the present and future of Sustainable Global Growth.*

Collaborative Strategic Outlook sangat penting untuk dimajukan karena akan menjadi *game changer* dari situasi dunia yang mengkhawatirkan dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih tinggi.

Sudah menjadi komitmen Indonesia untuk terus berada di depan guna memperkokoh paradigma *Collaborative Strategic Outlook* ini.

Hadirin yang saya hormati,

Indonesia memiliki aset yang besar untuk mengembangkan ekonomi yang berkualitas dan *sustainable.*

Pasar Indonesia besar. Penduduk produktif Indonesia juga besar.

Aset ini harus menjadi daya tawar tersendiri dan akan terus dikapitalisasi dalam mengembangkan kerja sama ekonomi dengan negara lain yang saling menguntungkan.

Indonesia akan terus membangun industri-industri bernilai tambah tinggi, berbasis sumber daya alam nasional, guna meningkatkan kualitas pembangunan sehingga tidak terjerat dalam "*middle income trap*".

Beberapa prioritas perundingan kerja sama ekonomi tahun 2020: ratifikasi IA CEPA; ratifikasi I-EFTA CEPA; penandatanganan RCEP; itensifikasi negosiasi PTA/FTA/CEPA dengan negara-negara Afrika, Asia Selatan dan Tengah serta Pasifik; penjajakan FTA dengan Eurasian Economic Union (EAEU); dan mendorong implementasi perjanjian ekonomi yang telah ditandatangani dengan negara mitra.

Tahun ini, Indonesia akan mengadakan:

- *World Economic Forum on ASEAN & the Indo-Pacific 2020*, 7-9 Juli 2020;
- *Halal Industry Summit*, yang akan menjadi *platform* kerja sama pengembangan industri halal;
- *Conference on Digital Diplomacy*, untuk mendukung penguatan ekonomi 4.0;
- *Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum* ke-2;
- *Indonesia-Middle East Energy Forum 2020*;
- *5th World Cocoa Conference September 2020*.

Diplomasi ekonomi juga akan difokuskan untuk menarik investasi yang berkualitas dalam mendukung prioritas pembangunan Indonesia yang *sustainable,* pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, penguatan industri hilir dan pembangunan pulau-pulau terluar, terdepan, termasuk Kepulauan Natuna.

Kemlu akan terus mendorong dan mengawal kebijakan *Outbound Investment* Indonesia di luar negeri untuk perluasan pasar produk Indonesia, maupun meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat global.

Dari pemetaan awal yang dilakukan Kemlu, setidaknya terdapat.. 285 *Outbound Investment* Indonesia saat ini dengan nilai mencapai USD 14,30 Milyar. Ini adalah aset ekonomi Indonesia yang harus terus dikawal, difasilitasi dan dikembangkan.

Hadirin yang saya hormati,

Globalisasi akan terus mendorong tingkat migrasi WNI ke luar negeri.

Intensitas dan kompleksitas permasalahan pun akan semakin meningkat.

Oleh karena itu, penguatan terhadap isu pelindungan semakin diperlukan.

Strategi pelindungan harus dilakukan secara holistik baik di tingkat domestik maupun internasional.

Pada tingkat domestik, kerja sama hulu dan hilir akan terus ditingkatkan, antara lain melalui: Rencana Aksi Nasional dalam rangka implementasi *Global Compact for Migration;* kampanye penyadaran publik mengenai migrasi aman; pengembangan ekosistem pengguna aplikasi *Safe Travel*, melalui kerja sama dengan berbagai lembaga penyelenggara perjalanan WNI ke luar negeri; dan memperkuat kebijakan satu data, dimana *database* WNI di luar negeri yang lebih akurat melalui Portal Peduli WNI akan terintegrasi dengan sistem *database* nasional.

Pada tingkat internasional, Indonesia akan terus mendorong universalisasi kesepakatan *Global Compact for Migration* untuk dorong migrasi yang aman, teratur dan regular; mendorong pembentukan *guideline* penanganan kasus penelantaran pelaut di forum *International Maritime Organization*/IMO; mendorong implementasi *ASEAN Consensus on the Promotion and the Protection of the Rights of Migrant Workers*; penguatan kerja sama penanganan kejahatan perdagangan manusia; danbmengintensifkan upaya penyelesaian MoU penempatan pekerja migran Indonesia di negara tujuan.

Sekali lagi, penguatan kehadiran negara dalam pelindungan WNI akan terus dilakukan di semua lini.

Hadirin yang saya hormati,

Mengenai diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, terdapat tiga prioritas.

Pertama, meningkatkan intensitas perundingan baik untuk batas maritim dan batas darat.

Untuk batas maritim, antara lain dengan:

- Malaysia, menformalkan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan selanjutnya merundingkan segmen Selat Malaka;
- Vietnam untuk batas ZEE;
- Filipina untuk batas landas kontinen;
- Palau untuk batas ZEE; dan
- Timor Leste setelah demarkasi batas darat selesai.

Untuk batas darat, prioritas antara lain demarkasi dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad, dan finalisasi demarkasi dengan Timor Leste sesuai *agreed principles* yang sudah disepakati.

Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia. Bahwa klaim apapun, oleh pihak manapun, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional.

Kedua, melindungi tumpah darah Indonesia.

Sebagaimana negara lain, isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar sama sekali.

Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga, kapanpun juga.

Indonesia akan terus melawan negara asing yang secara jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia, karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam PBB.

Ketiga, Indonesia akan terus mengarusutamakan isu yang menjadi aset bangsa, termasuk kemajemukan, demokrasi, toleransi dan pemberdayaan perempuan.

Dalam kaitan ini, maka di tahun 2020, beberapa kegiatan yang akan dilakukan Indonesia antara lain:

- Pelaksanaan Bali Democracy Forum;
- Peluncuran *Indonesia-Middle East Strategic Dialogue on Islam, Peace and Democracy*;
- Penguatan dialog dan kerja sama praktis untuk perempuan Afghanistan. Dalam kaitan ini, saya akan mengunjungi Afghanistan di awal 2020;
- Pelaksanaan Regional *Conference on Women, Peace and Security*, terutama penguatan kapasitas bagi para *negotiators* dan *mediators* perempuan;
- Pembentukan *South East Asia Network of Women negotiators and mediators*;
- Penguatan dialog lintas agama dan antar media dengan berbagai negara; dan
- Terus menggalakan kontak antar pemuda sebagai aset penyebar toleransi melalui program *Outstanding Youth for the World*.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, Indonesia akan terus berkontribusi menjadi bagian penyelesaian tantangan yang dihadapi dunia.

Di 2020, Indonesia mengharapkan agar kontribusi ASEAN dalam penyelesaian isu Rakhine State dapat diperkuat.

Menurut Indonesia, beberapa prioritas yang harus menjadi perhatian ASEAN, antara lain:

- Berfungsi penuhnya Ad-Hoc Task Force di Sekretariat ASEAN;

- Keberadaan ASEAN di Rakhine State untuk memperkuat *reception*; *transit centre*; dan memberikan rasa percaya bagi repatrian yang kembali ke Rakhine State;
- Memperkuat diseminasi informasi, dengan melanjutkan dialog dengan wakil-wakil *displaced persons* di Cox's Bazar; dan yang terpenting
- ASEAN dapat berperan dalam mendorong terjadinya repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat.

Masih terkait ASEAN, Indonesia sedang memperjuangkan sebuah narasi mengenai *ASEAN Identity*. Indonesia berharap narasi ini dapat disahkan pada 2020.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk terus memperkuat peran ASEAN di kawasan, membuat masyarakat ASEAN lebih merasakan *manfaat* ASEAN dan memperkokoh sentralitas ASEAN.

Menghadapi *age of disruption*, ASEAN harus bisa *adaptive*, melakukan reformasi untuk memastikan efisiensi dan efektifitas termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Indonesia akan terus mendorong hal ini, termasuk saat menjadi ketua ASEAN 2023.

Di Kawasan Pasifik, perluasan kerja sama baik ekonomi maupun pembangunan akan terus dipertebal, antara lain melalui: peluncuran Platfrom Kemitraan Pembangunan dengan Pasifik, guna mengatasi tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, bencana alam dan pencapaian SDGs; penunjukan Duta Besar Keliling untuk Kawasan Pasifik; dan menjadi tuan rumah *1st Leaders Meeting Archipelagic and Island States (AIS) Forum* pada Nopember 2020.

Hadirin yang Saya hormati,

Tahun 2020, Indonesia masih akan duduk di Dewan Keamanan PBB di saat yang sama Indonesia juga akan memulai tugasnya sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Pada saat Presidensi Indonesia di DK PBB Agustus 2020, Indonesia akan mengusung tema penanggulangan terorisme.

Indonesia juga akan terus mendorong kesatuan pandang DK PBB. Ini adalah cara agar DK PBB dapat melaksanakan mandatnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Indonesia akan menyelenggarakan *Informal Gathering Security Reform* untuk mendorong reformasi DK PBB.

Selama menjadi anggota Dewan HAM, Indonesia mengharapkan Dewan HAM dapat berfungsi sebagai mekanisme multilateral pemajuan kerja sama dalam mempromosikan perlindungan HAM. Indonesia tidak menghendaki Dewan HAM PBB dijadikan alat politik.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan nasional di bidang hak asasi manusia akan diintensifkan.

Di tingkat regional, Indonesia akan mengundang negara-negara di kawasan untuk berdialog dalam *Regional Conversation on Human Rights*, guna membahas agenda pemajuan HAM di tingkat Kawasan.

Hadirin yang terhormat,

Tahun 2020, Indonesia juga akan menjadi Ketua *Foreign Policy and Global Health.* Tema Keketuaan Indonesia adalah *Affordable Health Care.*

Diplomasi Indonesia untuk membela isu Palestina juga akan diteruskan.

Indonesia sadar, jalan ke depan akan terjal dan semakin sulit.

Namun, upaya membantu Palestina tidak akan surut, antara lain berupa: pemberian zero tariff, diluar 2 produk yang sudah diberikan; pembangunan rumah sakit di Hebron; perluasan rumah sakit di Gaza; pendirian sekolah di Ramallah; pelatihan *unconventional water treatm*ent dan pelatihan kapasitas polisi Palestina khususnya terkait dengan interpol.

Upaya Indonesia membantu Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian juga akan dilanjutkan, antara lain melalui: penyelenggaraan dialog ulama Indonesia-Afghanistan; pemberian pelatihan sesuai permintaan antara lain di bidang pemberdayaan ekonomi dan UMKM, pendidikan, kesehatan; dan toleransi umat beragama.

Selain itu, Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan ummah di berbagai belahan dunia.

Pada tahun 2020, Indonesia akan mencalonkan diri sebagai anggota ECOSOC periode 2021-2023. Indonesia mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut.

Hadirin yang berbahagia,

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk dapat lebih berkontribusi bagi perdamaian dan isu kemanusiaan dunia, menjelang akhir 2019, Indonesia telah meluncurkan Indonesian-AID yaitu dana kerja sama pembangunan.

Untuk memberikan *impact* kerja sama pembangunan yang lebih besar telah dijajagi kesepakatan kerja sama dengan negara lain dan berbagai lembaga yang relevan.

Kerja sama yang selama ini telah dijalin antara lain dengan Norwegia, JICA, GIZ, USAid dan AusAid.

Hadirin yang saya hormati,

Prioritas terakhir adalah pembangunan infrastruktur diplomasi.

Dalam 5 tahun terakhir, banyak infrastruktur diplomasi telah dibangun.

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri akan terus melakukan reformasi dan efisiensi.

Kementerian Luar Negeri telah menghapus jabatan eselon IV sejak tahun 2017 dan dalam waktu dekat jabatan eselon III sebagian besar akan dihapus dan digantikan penguatan jabatan fungsional.

Beban tugas rangkapan dan hal-hal terkait Perwakilan RI di luar negeri akan terus ditinjau ulang sesuai kebutuhan.

Tahun ini, Indonesia akan membuka perwakilan di Younde, Kamerun dan meningkatkan status Kepala Perwakilan RI di Antananarivo dari Kuasa Tetap menjadi Duta Besar.

Dalam 5 tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri telah membeli 11 gedung Perwakilan… yang berarti penghematan sebesar kurang lebih 20 milyar setiap tahunnya.

Pada 2020, Kemlu akan melakukan renovasi 51 gedung Perwakilan, setelah pada 2019 telah merenovasi 28 gedung Perwakilan.

Empat gedung baru perwakilan untuk KBRI Phnom Penh, KJRI Kuching, KRI Tawau dan KBRI Warsawa akan diresmikan.

Di era *disruptive technology*, infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi akan diperkuat sebagai bagian integral dalam mendukung diplomasi Indonesia.

Tahun ini, Kemlu akan lakukan transformasi digital, baik di pusat maupun perwakilan.

Dengan sistem digital yang kuat maka akan mendukung *remote working*; mengembangkan sistem *paperless* office; dan meningkatkan kapabilitas pengelolaan dan analisis data.

Sebagai penutup, saya sampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat dan staf di Pusat dan di Perwakilan, khususnya yang berada di perwakilan rawan dan berbahaya atas dedikasi dan kerja tiada kenal lelah.

Apresiasi juga saya berikan kepada DPR-RI, khususnya Komisi I atas kerja sama yang baik.

Saya juga sampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah membantu pelaksanaan diplomasi Indonesia, termasuk KADIN.

Begitu juga untuk seluruh rekan media, terima kasih atas kemitraan yang telah terjalin baik selama ini.

Ijin kan saya menutup dengan pernyataan Presiden Soekarno "… Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam."

Saya percaya usaha tidak mengkhianati hasil.

Terima kasih.

---000---